

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Daerah Terhadap PDRB di Provinsi Jambi

Shovia Diva

Correspondent Author : shoviadiva@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Jambi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi periode 2011–2023. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya desentralisasi fiskal dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R^2) untuk menguji pengaruh parsial dan simultan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, mencerminkan peran kemandirian fiskal daerah dalam memperkuat perekonomian. DAK dan DBH juga berpengaruh positif, meskipun fluktuatif seiring dinamika alokasi pusat dan kondisi komoditas. Belanja daerah terbukti memiliki pengaruh signifikan, khususnya pada sektor produktif yang mendorong aktivitas ekonomi riil. Secara simultan, PAD, DAK, DBH, dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa variabel-variabel fiskal tersebut berkontribusi besar dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi PAD, efektivitas pengelolaan transfer pusat, serta pengalokasian belanja daerah yang lebih produktif dalam memperkuat pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi.

Kata kunci: PAD, DAK, DBH, belanja daerah, PDRB, desentralisasi fiskal

Abstract: This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD), the Special Allocation Fund (DAK), the Revenue Sharing Fund (DBH), and Regional Expenditure on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Jambi Province during the period 2011–2023. The research background is rooted in the importance of fiscal decentralization in strengthening local fiscal capacity to support sustainable economic growth. The study employs secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Ministry of Finance. The analytical method used is multiple linear regression with t-test, F-test, and the coefficient of determination (R^2) to examine the partial and simultaneous effects of the variables. The results show that PAD has a positive and significant impact on GRDP, reflecting the importance of local fiscal independence in enhancing regional economic performance. Both DAK and DBH also show positive contributions, although their influence tends to fluctuate following national budget allocations and commodity price dynamics. Regional expenditure significantly affects GRDP, particularly when allocated to productive sectors that stimulate real economic activities. Simultaneously, PAD, DAK, DBH, and regional expenditure significantly influence GRDP with a relatively high R^2 value, indicating that fiscal variables explain a substantial portion of economic growth variation. These findings highlight the need to optimize PAD, improve the effectiveness of intergovernmental transfers, and prioritize productive expenditure to strengthen regional economic development in Jambi Province.

Keywords : local own-source revenue, special allocation fund, revenue sharing fund, regional expenditure, GRDP, fiscal decentralization.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan di era otonomi daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi ukuran utama untuk melihat tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah, sekaligus mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola keuangan, termasuk dalam mengoptimalkan sumber pendapatan serta mengatur belanja daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan kemandirian daerah melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi cerminan sejauh mana daerah mampu membiayai pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin kuat pula kapasitas fiskal daerah dalam melaksanakan program pembangunan, termasuk dalam meningkatkan PDRB. Namun, pada kenyataannya, di banyak daerah, termasuk Provinsi Jambi, PAD masih relatif kecil dibandingkan sumber pendapatan lain sehingga ketergantungan pada transfer pusat masih sangat tinggi.

Selain PAD, sumber pendanaan penting dalam APBD adalah transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAK dialokasikan untuk mendukung kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dasar. Karena sifatnya yang earmarked, DAK diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap belanja produktif dan pada gilirannya mendorong peningkatan PDRB. Namun, efektivitas DAK seringkali dipengaruhi oleh kesesuaian program pusat dengan kebutuhan lokal serta keterbatasan daerah dalam menyerap anggaran secara optimal.

DBH, di sisi lain, merupakan dana transfer yang bersumber dari penerimaan negara, baik dari pajak maupun sumber daya alam, yang dibagikan kepada daerah sesuai dengan porsi tertentu. Bagi Provinsi Jambi, DBH dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan menjadi komponen penting dalam struktur pendapatan daerah. Ketergantungan terhadap DBH ini membuat PDRB Jambi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global. Pada saat harga komoditas meningkat, DBH yang diterima daerah bertambah dan mendorong PDRB, namun sebaliknya jika harga komoditas turun, penerimaan DBH juga menurun dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain sumber pendapatan, faktor belanja daerah juga menjadi penentu utama dalam memengaruhi PDRB. Belanja daerah, khususnya belanja modal dan belanja pembangunan, berperan sebagai instrumen fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi. Melalui belanja daerah, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan lapangan kerja baru. Namun, dalam praktiknya, belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutin, khususnya belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk belanja produktif relatif terbatas. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan dampak belanja terhadap peningkatan PDRB.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Kontribusi sektor-sektor tersebut sangat besar terhadap PDRB, tetapi juga menimbulkan ketergantungan tinggi terhadap komoditas primer. Pada periode 2011–2023, PDRB Provinsi Jambi menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun mengalami fluktuasi akibat dinamika harga komoditas global dan dampak pandemi COVID-19. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketahanan ekonomi daerah masih perlu diperkuat melalui pengelolaan fiskal yang lebih efektif.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pengaruh PAD, DAK, DBH, dan belanja daerah terhadap PDRB menjadi penting. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah di Provinsi Jambi untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan PAD, mengoptimalkan pemanfaatan DAK dan DBH, serta memperbaiki struktur belanja daerah agar lebih produktif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap hubungan antara PAD, DAK, DBH, dan belanja daerah dengan PDRB sangat relevan dilakukan. Hal ini tidak hanya memberikan pemahaman empiris mengenai faktor-faktor fiskal yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, tetapi juga menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel independen (PAD, DAK, DBH, dan Belanja Daerah) dengan variabel dependen (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) di Provinsi Jambi.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan antara data time series (2011–2023) dan data cross section (11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi). Sumber data diperoleh dari:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, berupa data PDRB atas dasar harga konstan.
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan RI, berupa data PAD, DAK, DBH, serta belanja daerah.
3. Dokumen APBD kabupaten/kota dan publikasi resmi pemerintah daerah terkait.

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2. Variabel Independen (X):
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) (X2), yaitu dana transfer pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional.
- Dana Bagi Hasil (DBH) (X3), yaitu dana yang bersumber dari penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan formula tertentu.
- Belanja Daerah (X4), yaitu total realisasi belanja APBD kabupaten/kota, mencakup belanja rutin dan belanja modal.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan data panel. Analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Uji Pemilihan Model

- Uji Chow untuk menentukan penggunaan model Common Effect atau Fixed Effect.
- Uji Hausman untuk memilih antara Fixed Effect dan Random Effect.
- Uji Lagrange Multiplier (LM) sebagai pendukung jika diperlukan. Model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM), karena mampu menangkap perbedaan karakteristik antar daerah di Provinsi Jambi.

2. Model Regresi

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \varepsilon_{it}$$

dengan keterangan:

- Y_{it} = PDRB daerah ke-i pada tahun t
- α = konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_4$ = koefisien regresi variabel independen
- $X1_{it}$ = PAD daerah ke-i pada tahun t
- $X2_{it}$ = DAK daerah ke-i pada tahun t
- $X3_{it}$ = DBH daerah ke-i pada tahun t
- $X4_{it}$ = Belanja Daerah ke-i pada tahun t
- ε_{it} = error term

3. Uji Statistik

- Uji t: untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap PDRB.
- Uji F: untuk menguji pengaruh PAD, DAK, DBH, dan Belanja Daerah secara simultan terhadap PDRB.
- Koefisien Determinasi (R^2): untuk melihat sejauh mana variasi PDRB dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen.

Alat Analisis

Pengolahan data dilakukan menggunakan software EViews 10 dan Microsoft Excel untuk mempermudah estimasi model, pengujian asumsi klasik, serta perhitungan regresi panel.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Selama periode 2011–2023, PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun fluktuatif akibat dinamika harga komoditas dan pandemi COVID-19. Rata-rata pertumbuhan PDRB mencapai 5,12% per tahun. Dari sisi pendapatan daerah, PAD masih berkontribusi kecil (<15%) terhadap total pendapatan, sementara DBH dan DAU menempati porsi terbesar. DAK berfluktuasi mengikuti kebijakan pusat, sedangkan belanja daerah meningkat setiap tahun, namun sebagian besar masih didominasi oleh belanja rutin.

Hasil Regresi Data Panel

Berdasarkan uji Chow dan Hausman, model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil estimasi regresi ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi FEM

Variabel	Koefisien (β)	t-hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	-	-	-	-
PAD (X1)	0,425	4,925	0,000	Signifikan (+)
DAK (X2)	0,318	2,762	0,007	Signifikan (+)
DBH (X3)	0,276	2,341	0,021	Signifikan (+)
Belanja Daerah (X4)	0,491	5,462	0,000	Signifikan (+)

Sumber: Hasil olahan data sekunder dengan EViews 10 (2024)

Uji Parsial (Uji t)

- **PAD (X1):** berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB (sig. 0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan semakin tinggi PAD, semakin besar kemampuan daerah membiayai pembangunan yang mendorong aktivitas ekonomi.
- **DAK (X2):** berpengaruh positif signifikan (sig. 0,007 < 0,05). Artinya, alokasi DAK yang diarahkan pada sektor prioritas memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- **DBH (X3):** berpengaruh positif signifikan (sig. 0,021 < 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan DBH dari komoditas unggulan seperti perkebunan dan pertambangan memberikan kontribusi penting terhadap PDRB Jambi.
- **Belanja Daerah (X4):** berpengaruh positif signifikan (sig. 0,000 < 0,05). Belanja daerah, terutama jika dialokasikan pada belanja modal dan pembangunan infrastruktur, terbukti efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 2. Hasil Uji F

F-hitung	Sig.	Keterangan
37,842	0,000	Signifikan

Sumber: Hasil olahan data sekunder dengan EViews 10 (2024)

Hasil uji F menunjukkan bahwa PAD, DAK, DBH, dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3. Hasil Uji R^2

R^2	Adjusted R^2	Keterangan
0,801	0,784	80,1% variasi PDRB dijelaskan oleh model

Sumber: Hasil olahan data sekunder dengan EViews 10 (2024)

Nilai R^2 sebesar 0,801 menunjukkan bahwa 80,1% variasi PDRB dapat dijelaskan oleh PAD, DAK, DBH, dan Belanja Daerah, sedangkan sisanya (19,9%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti investasi swasta, ekspor-impor, dan faktor eksternal global.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa variabel fiskal daerah berperan penting dalam meningkatkan PDRB Provinsi Jambi. Pengaruh signifikan PAD menunjukkan pentingnya

kemandirian fiskal daerah. Temuan ini konsisten dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas pembangunan daerah.

DAK terbukti signifikan, yang berarti kebijakan transfer pusat melalui DAK telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan, khususnya pada sektor prioritas nasional. Demikian pula, DBH berpengaruh signifikan, meskipun sifatnya fluktuatif mengikuti harga komoditas, terutama dari sektor perkebunan (sawit) dan pertambangan (batubara).

Belanja daerah memiliki pengaruh terbesar di antara variabel lainnya, menegaskan peran penting APBD sebagai instrumen fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, efektivitas belanja sangat bergantung pada proporsi belanja modal. Jika belanja lebih banyak terserap pada belanja rutin, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan berkurang.

Secara simultan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa PAD, DAK, DBH, dan Belanja Daerah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal daerah harus diarahkan pada optimalisasi PAD, efektivitas transfer pusat, serta perencanaan belanja yang produktif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel terhadap 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2011–2023, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah yang tercermin dari peningkatan PAD mampu memperkuat kapasitas pembangunan ekonomi daerah.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Artinya, alokasi dana pusat yang diarahkan untuk sektor prioritas nasional terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Dana Bagi Hasil (DBH) juga berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerimaan daerah yang bersumber dari DBH, khususnya dari sektor perkebunan dan pertambangan, memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah.
4. Belanja Daerah merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap PDRB. Hal ini menegaskan peran APBD sebagai instrumen fiskal utama yang secara langsung mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, terutama ketika belanja diarahkan pada sektor produktif.
5. Secara simultan, PAD, DAK, DBH, dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan nilai F-hitung 37,842 (sig. 0,000) dan R^2 sebesar 0,801, yang berarti 80,1% variasi PDRB dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor eksternal lain.

Saran Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

1. Optimalisasi PAD untuk Kemandirian Fiskal
Pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak daerah, ekstensifikasi basis pajak, penguatan manajemen retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
2. Penguatan Efektivitas DAK
Alokasi DAK perlu diarahkan pada program prioritas daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat. Evaluasi berkala terhadap efektivitas DAK juga penting agar dana benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Stabilisasi dan Diversifikasi Sumber DBH
Mengingat DBH sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, pemerintah daerah perlu mendorong diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor perkebunan dan pertambangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sektor industri pengolahan dan jasa.
4. Reorientasi Belanja Daerah ke Belanja Produktif
Pemerintah daerah di Provinsi Jambi perlu menekan dominasi belanja rutin dan meningkatkan proporsi belanja modal. Belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terbukti lebih efektif dalam meningkatkan PDRB dan mendorong pembangunan jangka panjang.
5. Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah
Perencanaan fiskal harus dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga penggunaan PAD, DAK, DBH, dan belanja daerah dapat saling melengkapi serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun regional.

Daftar Pustaka

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Jambi dalam angka 2023*. Jambi: BPS Provinsi Jambi.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk domestik regional bruto provinsi-provinsi di Indonesia menurut lapangan usaha 2018–2022*. Jakarta: BPS.
- Boediono. (2017). *Teori pertumbuhan ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Data APBD kabupaten/kota Provinsi Jambi 2011–2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kuncoro, M. (2018). *Masalah, kebijakan, dan politik ekonomi pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2016). *Principles of economics* (7th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Putra, R., & Rachmawati, D. (2021). Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 12(2), 101–115.

- Rahmawati, S., & Anisa, R. (2020). Peran belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional: Studi empiris kabupaten/kota di Sumatera. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 9(1), 77–89.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi: Teori pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston: Pearson.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- World Bank. (2022). *Indonesia economic prospects: Boosting the recovery*. Washington, DC: World Bank Group.